

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK KEPENGHULUAN TELUK  
PULAU HULU KECAMATAN RIMBA MELINTANG  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**ANDISA**

**NPM : 147310717**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

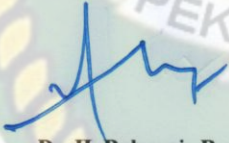
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Andisa  
NPM : 147310717  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan  
Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik  
Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba  
Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam Ujian Konferehensif

Pembimbing I,

Pekanbaru, 29 Oktober 2019  
Pembimbing II,

  
Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si

  
Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Budi Muliato, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Andisa  
NPM : 147310717  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan  
Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan  
Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang  
Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Penulis sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyah sebagai sebuah karya ilmiah.

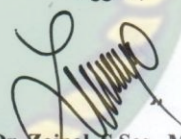
Pekanbaru, 29 Oktober 2019  
Sekretaris,

Ketua,

  
Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Anggota,

  
Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1,

Anggota,

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, S.IP., M.Si


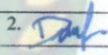


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 872/UR-Fs/Kpts/2019 tanggal 18 September 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 September 2019 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Andisa  
NPM : 147310717  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.*

Nilai Ujian : Angka : " 75 " ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf, S.IP., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.	Anggota	5.
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., M.A	Notulen	6.

Pekanbaru, 19 September 2019  
An. Dekan,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

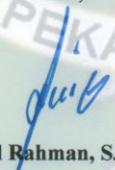
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andisa  
NPM : 147310717  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana  
Kepenghuluan Dalam Meningkatkan  
Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau  
Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten  
Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 19 September 2019  
An Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

  
Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

  
Budi Muliando, S.IP., M.Si

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini. Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi. Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir” Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr.H.Moris Adidi Yogia, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Mulianto, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Dr.H. Rahyunir Rauf., M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Dr. H. Morris Adidi Yogia., M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya di dalam penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengizinkan penulis untuk mengumpulkan data guna melengkapi berkas penulisan Skripsi yang sedang saya kerjakan.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan



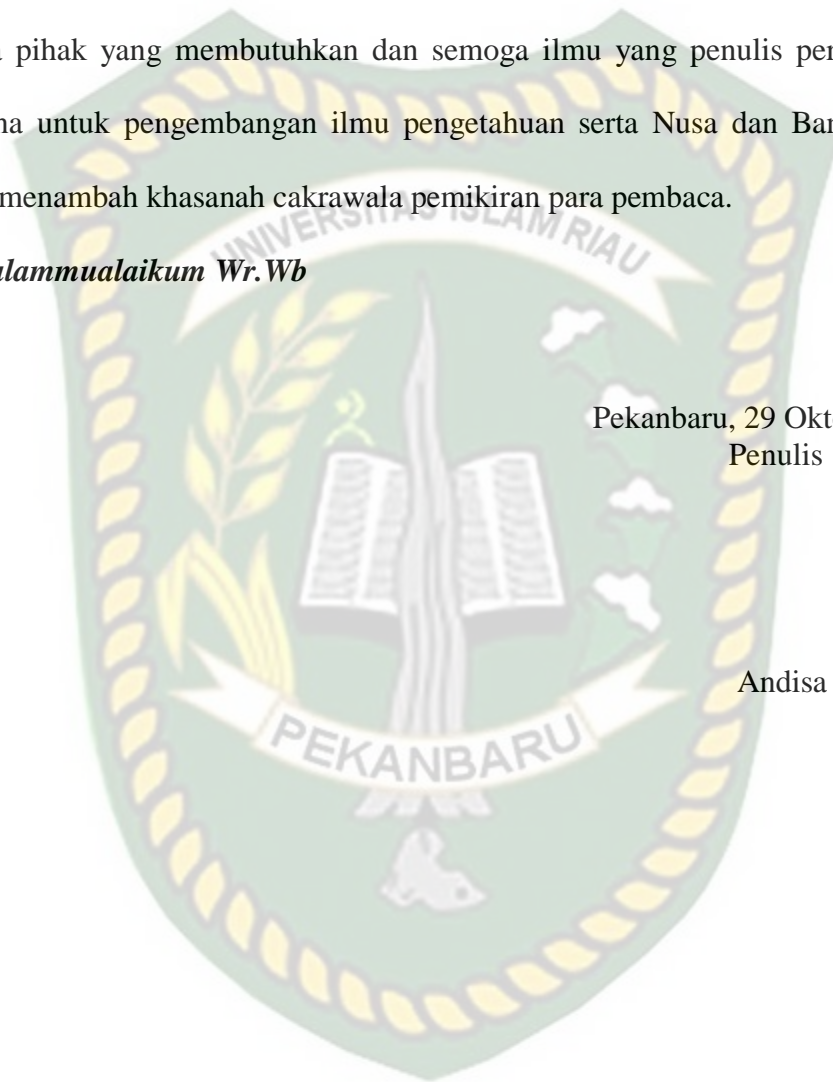
Skripsi penulis serta diharapkan sebagaibahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

***Wassalammualaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, 29 Oktober 2019  
Penulis

Andisa



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	9
1. Konsep Pemerintahan.....	9
2. Konsep Organisasi Pemerintahan .....	13
3. Konsep Evaluasi.....	16
4. Konsep Desa dan Pemerintahan Desa.....	20
5. Konsep Otonomi Daerah.....	23
6. KonsepAlokasi Dana Desa.....	26
7. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Kepenghuluan .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Konsep Operasional .....	32
E. Operasional Variabel.....	34

F. Teknik Pengukuran .....	36
----------------------------	----

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Populasi dan Sampel .....	41
D. Teknik Penarikan Sampel .....	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	46

### **BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Ringkas Rokan Hilir.....	48
B. Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.....	48

### **BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	57
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia .....	58
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	59
B. Hasil Dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Terkait Dengan Penelitian Berjudul Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.....	61
1. Efektivitas.....	61
2. Efisiensi.....	64
3. Kecukupan.....	67

4. Pemerataan .....	70
5. Responsivitas.....	72
6. Ketepatan.....	75
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.....	77
C. Faktor Penghambat Terkait Penelitian Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir .....	79
<b>BAB VI :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Anggaran Pendapatan Dana Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu 2017	3
I.2	: Realisasi Alokasi Dana Kepenghuluan Pada Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu	4
II.1	: Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu	30
II.2	: Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	35
III.1	: Tabel Populasi dan Sampel Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kabupaten Rokan Hilir	42
III.2	: Jadwal Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kabupaten Rokan Hilir	47
IV.1	: Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir	51
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	58
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	59
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	60
V.4	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang (Efektivitas)	62
V.5	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang (Efisiensi)	65

V.6	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang (Kecukupan)	68
V.7	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang (Pemerataan)	71
V.8	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang (Responsivitas)	73
V.9	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang (Ketepatan)	75
V.10	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	78

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka pemikiran tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	31
IV.I : Struktur Organisasi Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Kuisisioner Untuk Masyarakat dengan Judul Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	85
2 : Daftar Wawancara tentang Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	91
3 : Rekap Telly Penelitian untuk Masyarakat Tentang Penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	99
4 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul Penelitian Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	105
5 : Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	112
6 : Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir terkait Penelitian Tentang judul Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	114
7 : Surat Keterangan Balasan dari Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	116



### PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andisa  
NPM : 147110067  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Oktober 2019  
Pelaku Pernyataan,

  
Andisa



**EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK KEPENGHULUAN TELUK  
PULAU HULU KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN  
HILIR**

**ABSTRAK**

Oleh  
Andisa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang penggunaan alokasi dana Kepenghuluan untuk meningkatkan pembangunan fisik, dimana masih banyak pembangunan di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu belum terelisasi secara optimal seperti semenisasi jalan, pengecoran jembatan, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam meningkatkan pembangunan fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apasaja yang dialami oleh pihak Aparatur Pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dalam menggunakan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam meningkatkan pembangunan fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Indikator dari penelitian ini adalah Efektivitas, Evisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir “Cukup Optimal”.

Kata Kunci : Evaluasi, Alokasi Dana Kepenghuluan, Pembangunan Fisik

**EVALUATION OF USE OF ALLOCATION OF KEPENGHULUAN FUNDS  
IN INCREASING PHYSICAL DEVELOPMENT OF KEPENGHULUAN  
TELUK PULAU HULU  
RIMBA MELINTANG ROKAN HILIR DISTRICT**

**ABSTRACT**

By

Andisa

*This study aims to determine the Evaluation of the Usage of the Allocation Fund in Increasing the Physical Development of the Bay of Hulu Island, Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency. The problem raised in this study is about the use of Kepenghulan funds allocation to enhance physical development, where there is still a lot of development in the Kepenghuluan Teluk Hulu Island that has not been optimally implemented such as road shaping, bridge casting, and others. The purpose of this study was to determine the evaluation of the use of the Allocation Fund in increasing the physical development of the Hulu Kepululuan Bay in the Rimba Melintang District in the Rokan Hilir Regency and to find out any obstacles that were experienced by the Government of the Hulu Kepululuan Bay Government in using the Kepulhuan Bay Allocation in increasing Rokan Hilir Regency and to find out what obstacles were experienced by the Kepulu Pelululuan Government Apparatus in using the Kepululuan Bay Allocation in improving physical development Kepenghuluan Teluk Hulu Island Rimba Melintang District Rokan Hilir Regency. In conducting this research, researchers used a type of descriptive survey, with the type of qualitative research, qualitative research are methods to explore and understand the meaning by a number of individuals or groups of people ascribed to social or humanitarian problems. Indicators of this study are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. Types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the frequency table tool. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Evaluation of the Use of Allocation Funds in Improving Physical Development of Kepulhuan Bay, Pulau Hulu, Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency was "quite optimal".*

**Keywords:** *Evaluation, Allocation of First-Time Funds, Physical Development*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah mengenai pelaksanaan system desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkannya sumber daya secara optimal.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan saranaprasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor dimasyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Pada Kecamatan Rimba Melintang ada 12 (dua belas) Kepenghuluan, yaitu Harapan Jaya, Jumrah, Karya Mukti, Lenggadai Hilir, Lenggadai Hulu, Mukti Jaya, Pematang Botam, Pematang Sikek, Rimba Melintang, Seremban Jaya, Teluk Pulau Hilir, dan Teluk Pulau Hulu. Dari ke 12 kepenghuluan ini, penulis memilih Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, karena penulis melihat pembangunan yang ada di kepenghuluan tersebut masih kurang maksimal.

Pada Desa atau disebut dengan kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang, merupakan bagian dari daerah Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki hak otonomi daerah sama dengan daerah-daerah lainnya. Pemerintahan Desa berhak mengelola daerahnya termasuk di dalamnya pengelolaan pembangunan, perekonomian masyarakat yang bersumber dari pendapatan desa. Adapun sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepenghuluan ini memiliki kewenangan dalam mengurus atau melaksanakan pengembangan kualitas daerah baik dari segi perekonomian masyarakat maupun pembangunan-pembangunan kepenghuluan yang telah ada di dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa selanjutnya di sebut dengan ADK (Anggaran Dana Kepenghuluan) yang bersumber dari ke enam komponen yang sudah tertera sebelumnya dan di atur dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan Kepenghuluan yang menyatakan pada pasal 9 ayat 2 bahwa sumber ADK bersumber dari yaitu sebagai berikut:

Pemanfaatan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ketetapan penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja operasional Pemerintahan desa dan 70% untuk belanja Publik. Belanja operasional pemerintahan desa yang dimaksud adalah seperti belanja pegawai daerah (gaji pegawai) ataupun perlengkapan sarana dan prasarana pegawai desa, sedangkan belanja public adalah belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat umum seperti pembangunan jalan, sekolah, kesehatan, ataupun untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya berikut Anggaran Pendapatan Dana Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Tahun 2017:

**Tabel I.1: Anggaran Pendapatan Dana Kepenghuluan Teluk Hulu Tahun 2017**

Uraian	Rincian Perhitungan
	2017
Alokasi Dana Kepenghuluan	Rp.636.294.831

Sumber: Alokasi Dana Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu 2017

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat diketahui bahwa total Alokasi Dana Kepenghuluan pada tahun 2017 adalah Rp. 636.294.831. Alokasi Dana Kepenghuluan ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Tetapi di dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan yang bertujuan untuk pembangunan kepenghuluan baik pembangunan secara fisik seperti semenisasi jalan, pembangunan posyandu, pengecoran jembatan, pembangunan rehab Box culvert, pembangunan MCK mushallah, pembangunan pos kamling, pembangunan 30 unit bak pembakaran sampah, pembangunan gedung balai pertemuan kepenghuluan, pembangunan rumah wirid Kepenghuluan, pembangunan sumur bor dan bak air. Di dalam penelitian ini Penulis lebih memfokuskan kepada anggaran dana kepenghuluan di pembangunan fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Hal ini penulis mengharapkan pembangunan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dapat berkembang dengan baik. Berikut realisasi Alokasi Dana Kepenghuluan dengan pelaksanaan pembangunan desa Teluk Pulau Hulu yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana kepenghuluan:

**I.2: Realisasi Alokasi Dana Kepenghuluan Pada Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu**

No	Uraian/ Kegiatan	Rincian Perhitungan
		Pengeluaran Tahun 2017
1	Pembangunan Gedung Posyandu	Rp.70.546.600
2	Semenisasi Jalan Pendidikan	Rp. 87.221.350
3	Pembangunan Rehab Box Culvert Mini Jl. 1 Syek.H.Baharudin	Rp. 43.290.000
4	Pembangunan MCK Mushalla Babussalam	Rp. 58.498.500
5	Pembangunan Sumur Bor dan MCK Rumah Suluk	Rp. 66.901.000
6	Pembangunan Sumur Bor dab Bak Air Jl. Parit Suhu	Rp. 52.446.500
7	Pembangunan Sumur Bor dan Baik Air Jl. Suka Ramai	Rp. 26.309.950
8	Pembangunan Box Culvert Mini Jl. Tuk Khalifah Sanji	Rp. 35.175.000
9	Pembangunan Pos Kamling Jl. Tuk jatin	Rp. 31.233.400
10	Pembangunan 30 Unit Bak Pembakaran Sampah	Rp. 48.063.000
11	Pembangunan Renovasi Rumah Suluk Jl. Tuan syekh M. Daud	Rp. 31.254.000
12	Pembangunan Rumah Wirid Desa	Rp 89.851.700
13	Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Kepenghuluan	Rp.169.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 809.781.000</b>

Sumber: Anggaran Dana Kepenghuluan 2017

Dari data di atas dapat dilihat pembangunan Kepenghuluan secara fisik, hal ini dapat disimpulkan Pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu tidak memprioritaskan pembangunan desa pada pembangunan jalan. Realisasinya pembangunan jalan yang hanya di lakukan adalah semenisasi jalan, padahal juga diperlukan pengecoran jembatan, karna masih banyaknya jembatan yang mengalami kerusakan dan ada juga



yang masih menggunakan jembatan layang atau terbuat dari papan seadanya. Bukan hanya itu walaupun semenisasi jalan sudah dilaksanakan tetapi masih terdapatnya jalan-jalan yang rusak dan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Selain itu dana alokasi dana kepenghuluan tidak seimbang dengan pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan, karena alokasi dana kepenghuluan berjumlah Rp.636.294.831, sedangkan pengeluaran dana untuk pembangunan dana kepenghuluan adalah Rp. 809.781.000, hal ini terdapat minus atau kekurangan dana sebesar Rp. 173.486.169. Dari gambaran perselisihan angka ADK dengan pengeluaran untuk pembangunan tidak seimbang, sehingga mengakibatkan pembangunan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.

Dari permasalahan di atas tentunya pelaksanaan penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Kepenghuluan Teluk Pulau belum terealisasi dengan optimal. Untuk itu penulis dapat menarik beberapa fenomena-fenomena yang ada di lapangan:

1. Terindikasi bahwa pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu belum terealisasi dengan optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya bangunan jalan yang belum dilaksanakan seperti semenisasi jalan, pengecoran jembatan, dan lain-lain.
2. Berdasarkan data yang di dapatkan oleh penulis, dapat dilihat bahwa penggunaan dana desa Teluk Pulau Hulu belum terealisasikan dengan

baik, karena penerimaan dana yang digunakan untuk pembangunan tidak sesuai dengan realisasi dana pembangunan fisik (infrastruktur jalan)

3. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi Aparatur Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu yang mengatur Dana Kepenghuluan untuk pembangunan fisik Kepenghuluan.

Untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan penggunaan dana desa Teluk Pulau Hulu serta didasarkan fenomena-fenomena yang ada di latar belakang, maka penulis bermaksud melaksanakan penelitian dan kemudian akan mendeskripsikan dalam bentuk penulisan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi wilayah dan masalah yang akan di bahas yaitu wilayah yang bersentuhan langsung dalam penggunaan Dana Desa Teluk Pulau Hulu untuk pembangunan fisik desa, dan dengan didasari dari masalah-masalah yang terjadi dan dijadikan fenomena maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”**.

#### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di kemukaan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan apa saja yang di alami oleh pihak Aparatur Pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Dalam Menggunakan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

**b. Manfaat Penelitian**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan pada umumnya.
2. Hasil Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian di bidang yang sama dengan yang ini.

3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan informasi ataupun sebagai bahan masukan kepada pihak Aparatur Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu,



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep atau teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi bahan pendukung yang konkret untuk pelaksanaan penelitian di lapangan. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologis, definisi pemerintahan dapat diartikan sebagai memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah, pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah.

Menurut Ndraha (2011:7) mengatakan Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2011:23) mengatakan Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah,

mapun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2000:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut H.A Barsz yang dikutip didalam buku Inu Kencana yang berjudul Sisitem Pemerintahan Indonesia mendefinisikan Ilmu Pemerintahan, sebagai berikut :  
“Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya”. (Syafi’i,1999:12) Diterangkan pula oleh Talizidubu Ndraha dalam bukunya yang berjudul Metodologi Ilmu Pemerintahan adalah sebagai berikut :  
“Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari proses politik (Alokasi Otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara”. (Ndraha,1997:16)

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195).

Pengertian ilmu pemerintahan menurut Syafi'i (2001:24) dalam bukunya pengantar ilmu pemerintahan, sebagai berikut: "Ilmu Pemerintahan yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar".

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan

(harapan,kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dana para administrator itu sendiri.



Menurut Soewarjono dan Djohan (dalam Labolo, 2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dari uraian di atas diperoleh pokok pemahaman tentang ilmu Pemerintah sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari perosalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain di atur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ilmu pemerintah adalah ilmu yang mempelajari struktur, prosedur dan rangkaian badan-badan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
3. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan atau merujuk pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat, dan oleh sebab itu Ilmu Pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama; fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi hak masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing badan publik; dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi kewajiban masyarakat yang menjadi hak negara yang dikelola oleh badan-badan publik. (Labolo, 2011:37)

## 2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi

dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Organisasi merupakan pengaturan yang disengaja terhadap sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sebagai sistem terbuka yang terdiri dari sub sistem dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana organisasi berada. Sistem adalah perangkat komponen yang saling berkaitan yang secara bersama sama mengarah pada pencapaian tujuan; masing-masing komponen merupakan suatu sistem tersendiri dan disebut subsistem.

Organisasi sebagai kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi

pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. Jadi Organisasi pemerintah adalah [organisasi](#) atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses [politik](#) dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut.

### 3. Konsep Evaluasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu di tunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya.

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah di lakukan dan akan di gunakan untuk meramalkan, memerhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Arikunto dan Cepi dalam Afifudin (2013;251) Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah di lakukan dan akan di gunakan untuk meramalkan, memerhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan

ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parsons (2006:547) adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin di capai.

Berbeda dengan evaluasi kebijakan dalam arti yang lebih spesifik menurut Dunn (2003:608) yaitu:

“Berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut member sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau di atasi.

Menurut Agustino (2008:188-189), fungsi evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan harus member informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan adalah:
  - a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dicapai.
  - b. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azazi manusia ketika kebijakannya dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran

Dalam kebijakan public terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.

- c. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh public ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk member informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari *perwujudan right to know* bagi warga masyarakat.
2. Evaluasi kebijakan berfungsi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Pendekatan-pendekatan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:613) adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak controversial.

b. Evaluasi Formal

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari

evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Menurut Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut: (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, (6) Ketepatan. Sedangkan, Suchman dalam Winarno (2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e. Menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau Karena penyebab yang lainnya.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Berdasarkan pemaparan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Dengan kriteria Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.



#### 4. Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut UU No. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haryanto (2007: 2) desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, desa memiliki wewenang yaitu (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa; (2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

Desa menurut Widjaja (2003;3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 23 tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah Peraturanperaturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan

pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat

istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

## **5. Otonomi Daerah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machstaat). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan kepada kekuatan kekuasaan semata, tetapi didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (Rechtsidee) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi didalam Negara Republik Indonesia. Di Indonesia hukum bersumber kepada Pancasila. Pancasila dipergunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga hukum di Indonesia untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang mempunyai kepribadian dan falsafah Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip permusyawaratan atau demokrasi. Artinya secara administratif pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi, maka lahir satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan Siddiq (2003:168) Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak” dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b. Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (self-government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
- c. Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local or internal affair) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
- d. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil

Asas otonomi dan pelaksanaan desentralisasi dalam hubungan antara Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tentang ini M. Yamin (2012:92), menyatakan:

“susunan tata negara yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan itu pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan pula membutuhkan pembagian kekuasaan itu antara pusat dengan daerah. Asas demokrasi dan desentralisasi tenaga pemerintahan ini berlawanan dengan asas hendak mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan.”

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari Negara yang menganut paham demokrasi. Jauh sebelum Indonesia merdeka M. Hatta di dalam Mahfud (2012:92) mengatakan:

” Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, desa dan di daerah. Dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat otonomi (membuat dan menjalankan peraturan-peraturan sendiri) dan *zelbestuur* ( menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan yang lebih tinggi). Keadaan

seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlain-lainan”

Jadi otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintah daerah yang memperoleh hak otonom. Adanya pemerintah daerah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan.

Sedangkan daerah otonom menurut Widjaja (2002:95), adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah otonomi berdasarkan Mahfud (2012:95) mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri ada dua unsur: Pertama, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang dapat membangkitkan oto-aktivitas dan mempertinggi rasa harga diri yang sebaik-baiknya.

Otonomi Mahfud (2012:95) merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang

ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan yaitu, sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Otonomi daerah dalam Widjaja (2002:76) diartikan juga adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan masing-masing.

## **6. Konsep Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima dengan sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten



diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1) kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas wilayah, dan
- 7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

#### **7. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Kependhuluan**

Di dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa/Kependhuluan tentunya di atur dalam bentuk Peraturan Daerah. Berikut Perda Kabupaten Rokan Hilir nomor 6 Tahun 2015 Pasal 10 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kependhuluan:

- 1) Pengalokasian ADK dibagi secara merata kepada seluruh kependhuluan sebesar 60% dan sisanya 40% dibagi Penghulu secara proporsional menurut data penduduk miskin, kependhuluan terisolir, kependhuluan tandus, dan kependhuluan yang berada di pesisir pantai.

- 2) Pemanfaat ADK yang diberikan pada kepenghuluan 30% diperuntukkan operasional, belanja aparat kepenghuluan dan administrasi penyelenggaraan pemerintahab kepenghuluan, dan 70% diperuntukkan bagi belanja public dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yang berkaitan denagn judul penelitian “Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”, yaitu sebagai berikut:

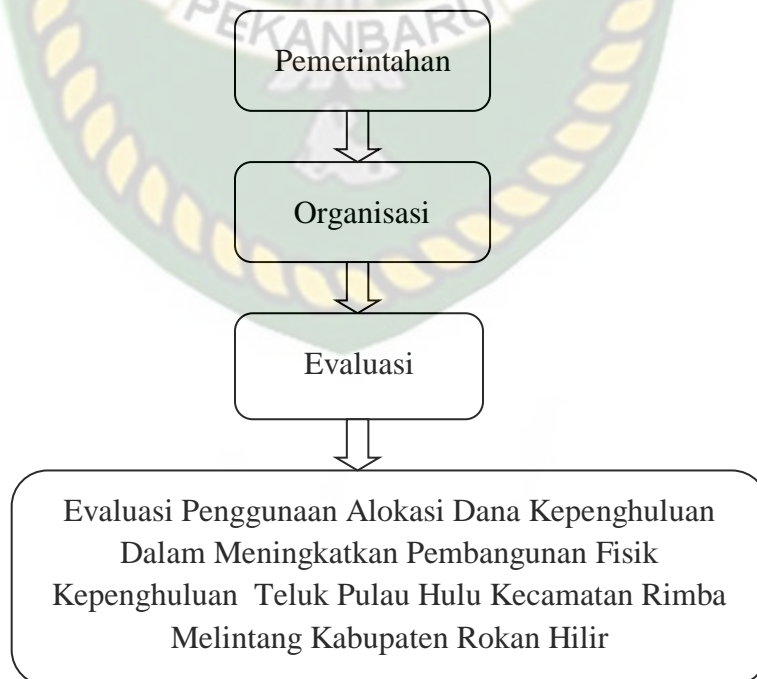


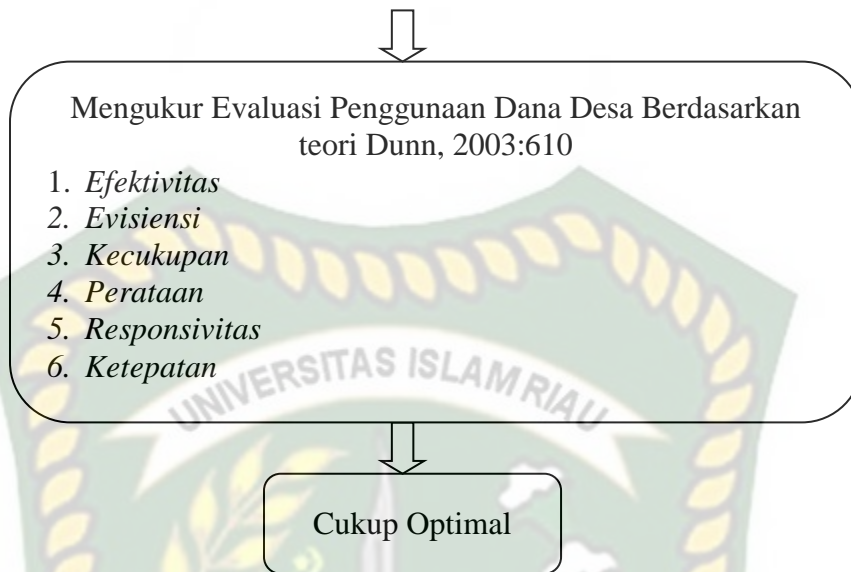
**Tabel II.1: Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Tempat Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang	Penggunaan Anggaran Dana Desa oleh Aparatur Desa.	Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang	<p>1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penggunaan dana kepenghuluan untuk pembangunan fisik, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan dana desa oleh aparatura dana desa.</p> <p>2. Penulis melakukan penelitian di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang, sedangkan penelitian terdahulu melakukan peneltian di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerrang.</p>

2.	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016	Evaluasi dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan Desa tertinggal	Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penggunaan dana kepenghuluan untuk pembangunan fisik, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan dana desa untuk Desa tertinggal.</li> <li>2. Penulis melakukan penelitian di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kecamatan Tirtayasa.</li> </ol>
----	--	--	--------------------------------------	--

**C. Kerangka Pikir**





Sumber: Dunn, 2003:610

**Gambar II.I**  
**Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**

#### D. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan

keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu di tunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya
4. Indikator Dari Variabel Evaluasi Adalah:
  - a. *Efektivitas*  
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
  - b. *Efisiensi*  
Adalah erbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.
  - c. *Kecukupan.*  
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
  - d. *Pemerataan.*

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

*e. Responsivitas.*

Responsivitas menurut Agus Dwiyanto (2006:148) adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan.

*f. Ketepatan.*

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

## **E. Operasional Variabel**

Operasional Variabel adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat di amati (Anwar, 2003:74).



Sedangkan pengertian lain terkait dengan Operasional Variabel adalah sebagai suatu unsure penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di ukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian dilapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat di amati dengan kata-kata yang dapat di uji dan diketahui kebenarannya (Singarimbun, 1997:103)

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**

Konsep	Indikator Variabel	Item Penilaian	Skla pengukuran
1	2	3	4
Berdasarkan KBBI evaluasi adalah saduran dari bahasa inggris “ <i>evolution</i> ” yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian.	1. Efektivitas	a. Pengelolaan dana Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan b. Meningkatkan Kualitas apparatus Pemerintahan Kepenghuluan	Nominal
	2. Efisiensi	a. Mengatur rencana kegiatan pembangunan Kepenghuluan b. Melaksanakan pembangunan Kepenghuluan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditentukan	Nominal
	3. Kecukupan	a. Pembangunan yang dilakukan sesuai dengan dana yang di anggarkan b. Pembangunan Kepenghuluan yang dilaksanakan sesuai dengan masyarakat Kepenghuluan butuhkan	Nominal

	4. Perataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan dilakukan dengan secara merata dan adil</li> <li>b. Pengelolaan Dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> </ul>	▪ Nominal
	5. Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aparatur Pemerintah Kepenghuluan selalu respon dengan baik terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat</li> <li>b. cepat tanggap dalam melakukan inovasi pengembangan pembangunan Kepenghuluan</li> </ul>	▪ Nominal
<b>Konsep</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Item Penilaian</b>	<b>Skla pengukuran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Berdasarkan KBBI evaluasi adalah saduran dari bahasa inggris “ <i>evolution</i> ” yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian.	6. Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merealisasikan pembangunan fisik sesuai dengan alokasi dana kepenghuluan.</li> <li>b. Merealisasikan pembangunan fisik sesuai dengan perencanaan pembangunan</li> </ul>	▪ Nominal

Sumber: Dunn, 2003:610

#### F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Mencapai ( 67%-100% )

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Mencapai ( 34%-66% )

Tidak Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Mencapai ( 0%-33% )

**a. Efektivitas**

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100% )

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66% )

Tidak Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%)

**b. Efisiensi**

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%)

**c. Kecukupan**

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33% )

**d. Pemerataan**

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100% )

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66% )

Tidak Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%)

**e. Responsivitas**

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100% )

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66% )

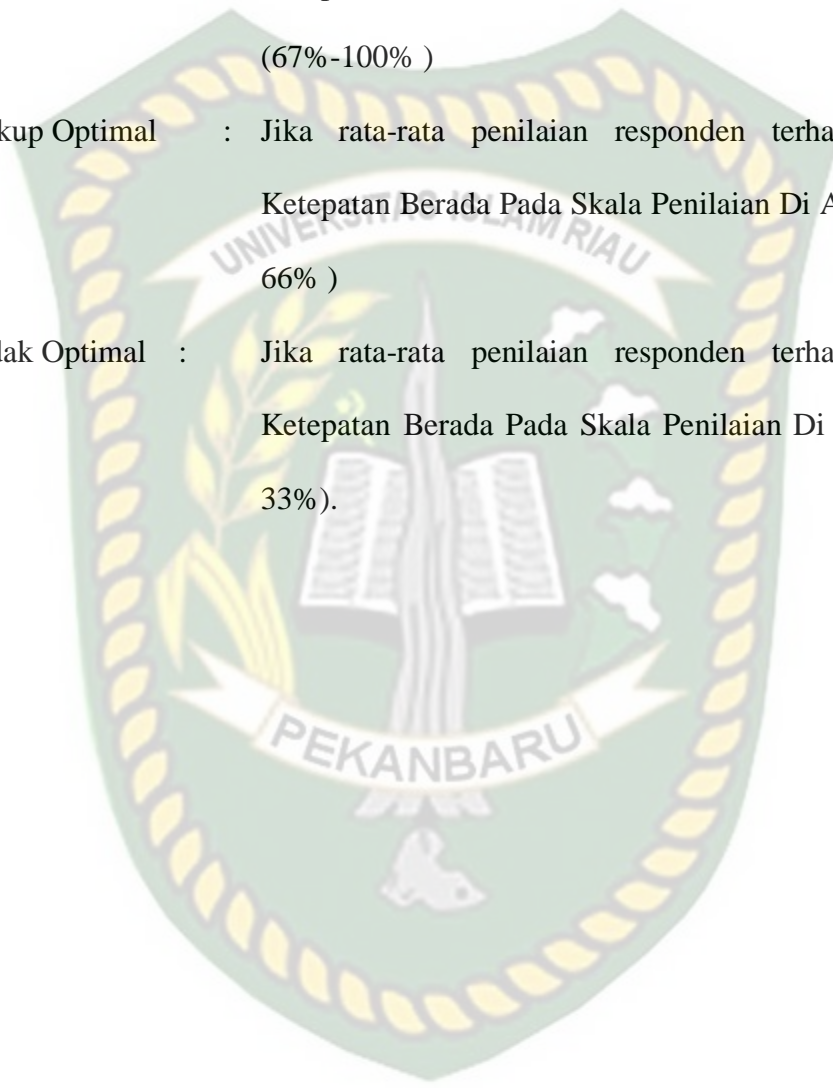
Tidak Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%).

**f. Ketepatan**

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100% )

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66% )

Tidak Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (0%-33%).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63). Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2012 : 16) proses penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat linear, dimana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan dan saran. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetai dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram.

#### B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian adalah di Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait terkait Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, dan berdasarkan pernyataan masyarakat yang penulis jumpai mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pada Desa Teluk Pulau Hulu belum maksimal.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).



Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi: Penghulu Teluk Pulau Hulu, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan serta masyarakat Desa Teluk Pulau Hulu.

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kabupaten Rokan Hilir**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penghulu Teluk Pulau Hulu	1	1	100%
2	Kaur Keuangan Teluk Pulau Hulu	1	1	100%
3	Kaur Perencanaan Teluk Pulau Hulu	1	1	100%
4	Masyarakat Teluk Pulau Hulu	3.576	97	3%
<b>Jumlah</b>		<b>3579</b>	<b>100</b>	<b>3 %</b>

*Sumber : Olahan Penulis tahun 2019*

Jumlah populasi untuk masyarakat Teluk Pulau Hulu yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah 3.576 orang, penelitian ini menggunakan metode slovin dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan

n : Sampel

N : Populasi

d : Besarnya tingkat kesalahan

1 : Konstan

$$n = \frac{3576}{1 + 3576(0.1)^2}$$

$$n = \frac{3576}{1 + 3576(0.01)}$$

$$n = \frac{3576}{1 + 35.76}$$

$$n = \frac{3576}{36.76}$$

$$n = 97 \text{ Sampel}$$

Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir memiliki populasi yang mana adalah Penghulu Teluk Pulau Hulu sebanyak 1 Orang, dengan persentase 100%, Sekretaris Desa 1 orang dengan persentase 100%, Kaur Keuangan 1 orang dengan persentase 100%, Kaur Perencanaan Sebanyak 1 Orang dengan persentase 100%, dan yang terakhir adalah masyarakat di Desa Teluk Pulau Hulu memiliki sampel 97 Orang dengan persentase 100%. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono,2007;73).

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Penghulu Teluk Pulau Hulu, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan,dan kaur Perencanaan digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah

sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

- b. Untuk Masyarakat di Desa Teluk Pulau Hulu digunakan rumus slovin dan di lapangan akan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Desa Teluk Pulau Hulu. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Desa Teluk Pulau Hulu.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian

- c. Struktur Organisasi Kantor Teluk Pulau Hulu.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

d. Dokumentasi

Sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.





## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas Rokan Hilir

##### 1. Sejarah dan Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah di kenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan merdeka No. 58 Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881, 59 KM<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; sebelah selatan dengan Kabupaten Kanpar dan Bengkalis; sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara; dan sebelah Timur dengan Kota Dumai. Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah; Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350KM.



Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Secara geografis letak Kabupaten Rokan Hilir di garis Khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang <sup>48</sup> tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara 26 – 32. Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52 rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang dari musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya lima bulan.

Curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentukan delta. Sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu; Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah sungai Rokan. Panjang Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat di layari sampai ke

hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunkan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci menjadi bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain-lain).

Sungai Rokan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak asing lagi. Ia merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keadaan muara Sungai Rokan terjadi pendangkalan, karena adanya erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta. Lebar sungai Rokan hanya tinggal beberapa meter saja. Sungai bagi masyarakat Melayu adalah mempunyai beberapa peranan, seperti sebagai sarana transportasi (jalan raya sebelum adanya jalan darat) untuk menghubungkan satu kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain, sumber kehidupan, tempat untuk bermain. Peran yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi lokal seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Jika sungai Rokan hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisi, adat dan budaya. Artinya potensi yang bersumber dari air yang bernama Sungai Rokan sudah hilang di Bumi Negeri Seribu Qubah. Oleh karena itu, agar identitas, jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, jaga keberadaan sungai tersebut, melalui pelestarian hutan dan Bandar di daerah hulu. Jika hulu rusak, maka hilir juga rusak. Apabila hulu baik, maka hilir juga baik. Untuk itu, pemimpin daerah yang berada di daerah aliran sungai (DAS), perlu melakukan koordinasi dan

sinkronisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Agar kekayaan hari ini juga dinikmati oleh generasi berikutnya.

## 2. Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibukota ditetapkan di Bagan Siapi-api. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupkan kembali Kota Bagan Siapi-api sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi ibukota Propinsi Bangko semasa kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagan siapi-api sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota Bagan Siapi-api ditunjuk sebagai ibukota Kabupaten. Alasan lain adalah sarana dan prasarana di Kota Bagan sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain. Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanah Putih
2. Kecamatan Kubu
3. Kecamatan Bagan Sinembah
4. Kecamatan Bangko dan
5. Kecamatan Rimba Melintang

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir dua belastahun berdiri

Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.1

**Table IV.1: Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	Persentase
1.	Tanah Putih	Sedinginan	1.915.23	21.56
2.	Pujud	Pujud	984.90	11.09
3.	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	198.39	
4.	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231.13	2.60
5.	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847.35	9.54
6.	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445.55	5.02
7.	Kubu	Teluk Merbau	1,061.06	11.95
No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	Persentase
8.	Panipahan	Panipahan	669.63	7.54
9.	Bangko	Bagansiapiapi	475.26	5.35
10.	Sinaboi	Sinaboi	335.48	3.78
11.	Batu Hampar	Bantayan	284.31	3.20
12.	Pekaitan	Pedamaran	465.30	5.24
13.	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235.48	2.65
14.	Bangko Pusako	Bangko Kanan	732.52	8.25
<b>Jumlah</b>			<b>8.881.59</b>	<b>100.000</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2013

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah kabupaten yang terbaru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 organisasi perangkat daerah di bentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Padatahun 2011 usia kabupaten Rokan Hilir memasuki tahun yang ke 12 (dua belas tahun). Pada tahun ini juga periodisasi dari pemerintahan secara otonom telah memasuki tahap ke II (tahun ke enam). Untuk itu pemerintah Rokan Hilir menyusun rancangan pembangunan jangka menengah tahun ke enam periodisasi kedua. Rancangan pembangunan jangka menengah ini merupakan pedoman bagi organisasi perangkat

daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (SKPD = Organisasi Perangkat Daerah).

Sumber daya aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data yang tersedia dari BPS berjumlah 4.267, yang tersebar pada 42 dinas, instansi dan kantor. Apabila dilihat dari jenjang pendidikannya sebagian besar adalah berpendidikan diploma dan sekolah menengah. Untuk aparat yang berpendidikan sarjana (Strata dua dan Strata satu) hanya 19.40%. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas pendidikan bagi aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terutama untuk pendidikan formal yang mengarah pada aparat pemikir untuk merancang pengembangan Kabupaten Rokan Hilir yang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Rokan Hilir.

#### **B. Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**

Rimba Melintang diambil dari nama sungai, yaitu Rimba Melintang. Sungai ini bermuara di Sungai Rokan, bagian hilir dari jembatan Jumrah sekarang. Dimana di daerah itu merupakan hutan yang dikelilingi oleh sungai, Rimba Melintang berada ditengah-tengah sehingga apabila dilihat dari hilir sungai, bagian hulu sungai tidak terlihat, begitu juga sebaliknya ketika dilihat dari hulu, bagian hilir sungai juga tidak terlihat. Sehingga disebutlah nama daerah itu Rimba Melintang yang artinya hutan yang melintang. Penamaan Desa Rimba Melintang ada kaitannya dengan Tuanku

Tambusai. Waktu itu Tuanku Tambusai asik dikejar oleh belanda, maka larilah mengikuti Sungai Rokan. Pas mereka dari Jumrah mengikuti arah sungai, maka nampaklah hutan melintang yang buntu. Hal ini membuat kekhawatiran mereka, sehingga ada salah satu anggotanya yang bernama Muhammad Saleh berdoa supaya hutan itu tidak tertutup. Tapi mereka tetap melanjutkan jalannya, sehingga singgahlah ditepi sungai yang daerah Rimba Melintang yang sekarang ini. Karena dilihat tempat itu masih sunyi dan hutan semua, maka diberilah nama Rimba Melintang.

Setelah kalahnya Tuanku Tambusai dan ditaklukkanya Benteng Tujuh Lapis di Dalu-dalu oleh Belanda, Tuanku Tambusai dan rombongannya melarikan diri ke Malaka melalui sungai Rokan. Dalam perjalanan ke Malaka, mereka berhenti di hulu sungai tepatnya di Jumrah, ketika dilihat dari hulu, sungai itu lurus seperti sungai yang tertutup yang tidak ada ujungnya lagi. Hal ini menyebabkan kekhawatiran apabila sungai itu buntu maka belanda akan menemukan mereka. Takut akan hal itu terjadi maka salah satu dari pasukan Tuanku Tambusai yang bernama Muhammad Saleh berdoa, apabila sungai itu terbuka dan ada jalan selanjutnya mereka berniat akan memotong kambing atau berjamu ditempat tersebut.

Mereka masih tetap berjalan mengikuti alur sungai, semakin ke hilir semakin nampaklah jalan keluar sungai tersebut. Kemudian mereka singgah ditengah-tengan sungai tersebut. Mereka menambat perahunya dan membuat kemah-kemah untuk beristirahat. Karena merasa doanya sudah dikabulkan, bahwa sungai yang tertutup telah terbuka, mereka memotong kambing dan masak-masaklah disana. Karena

daerah itu sunyi belum ada penghuninya mereka bingung apakah nama daerah yang mereka singgahi. Mereka berfikir, ketika dipandang dari hulu sungai terlihat melintang, dan apabila dilihat dari hilir juga melintang dan tempatnya juga dipenuhi dengan hutan, maka diberilah nama Rimba Melintang, yang berarti Hutan yang Melintang.

Kemudian mereka tinggallah beberapa saat disana. Mereka membuka hutan-hutan tersebut untuk menanam sayur, ubi, dll yang digunakan sebagai perbekalan ke Malaka dan juga untuk bersembunyi dari kejaran belanda. Ketika mereka merasa persiapannya sudah cukup untuk ke Malaka, maka mereka meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Malaka. Setelah Tuanku Tambusai dan pasukannya pergi, banyaklah orang yang berdatangan untuk bercocok tanam disana karena melihat hutan disana sudah ada yang dibuka. Orang yang pertama datang untuk bercocok tanam adalah dari Bangko, karena Rimba Melintang merupakan kawasan dari datuk Bangko, sebelum Rimba Melintang ada, Bangko, Tanah Putih dan Kubu juga sudah ada, karena ketiganya merupakan negeri tua. Pada masa itu wilayah kedatukan ditempati di tiga wilayah tersebut. Setelah rombongan dari Bangko yang pertama membuka lahan untuk bercocok tanam, maka banyaklah orang yang datang untuk membuka lahan disana.

Ada yang dari Bangko, Tanah putih dan sebagainya. Mereka juga sudah berbaur satu sama lain disana sambil menunggu waktu panen. Tetapi mereka tidak menetap disana, mereka datang hanya untuk bercocok tanam, setelah panen kemudian pulang ke kampungnya masing-masing. Rombongan yang datang dari tanah Putih

yaitu rombongan dari Tengku Sulung. Mereka datang untuk membuka lahan dan menanam padi. Mereka membuka lahan dan menanam padi bukan di Rimba Melintang melainkan di Parit Degol. Mereka yang berladang disana mulai bertempat tinggal disana dan menetap. Setelah Parit Degol dihuni oleh penduduk barulah tempat yang disinggahi Tuanku dihuni oleh penduduk. Penduduknya berasal dari Bangko dan Tanah Putih. Pada saat itu Rimba Melintang belumlah bersifat desa. Pada tahun 1904 Rimba Melintang sudah bersifat pemerintahan desa. Penduduk yang pertama menempati yaitu rombongan dari Tengku Sulung. Penghulu pertama yaitu Penghulu Nonik yang merupakan orang Bangko. Sebelum menjadi kepenghuluan Rimba Melintang dibawah kekuasaan Bangko yang dikuasai oleh orang kaya Mak Ali.

Pada Kecamatan Rimba Melintang terdapat beberapa kelurahan/desa yaitu Harapan Jaya, Jumrah, Karya Mukti, Lenggadai Hilir, Lenggadai Hulu, Mukti Jaya, Pematang Botam, Pematang Sikek, Rimba Melintang, Seremban Jaya, Teluk Pulau Hilir, Teluk Pulau Hulu. Dari ke 12 kelurahan/desa ada salah satu lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu Kepenghuluan Rimba Melintang.

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.**



**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH  
KEPENGHULUAN TELUK PULAU HULU KECAMATAN RIMBA MELINTANG  
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2018**



Sumber : *Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang 2019.*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat dan juga penulis melakukan wawancara dengan Penghulu Teluk Pulau Hulu, Sekretaris Kepenghuluan, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan menyebarkan kuisisioner sebanyak 97 responden untuk Masyarakat Teluk Pulau Hulu.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

#### I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana  
 Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau  
 Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, serta dengan cara  
 57  
 penyebaran kuesioner maka identitas responden penelitian yang digunakan  
 berdasarkan jenis kelamin berikut ini:

**Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	49	51%
2	Perempuan	48	9%
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat yang  
 dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Penggunaan  
 Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik  
 Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kabupaten Rokan Hilir adalah dominannya laki-laki  
 dengan jumlah 49 orang dengan persentase 51% dari Total keseluruhan responden  
 mencapai 48 Orang responden dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat  
 sebanyak 97 orang.

## **2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia**

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar  
 belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini,  
 karena semakin matang usia seseorang maka cara berfikirnya pun tentunya sudah

berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	26	27%
2	31-40 Tahun	40	41%
3	41-50 Tahun	27	28%
4	>50 Tahun	4	4%
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.2 diatas dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun sebanyak 40 orang dengan persentase 41% dan usia pada 41-50Tahun yang berjumlah 27 orang (28%), sealnjutnya usia 20-30 Tahun berjumlah 26 orang responden dengan persentase 27%, sedangkan usia paling minim adalah >50 Tahun yaitu berjumlah4 orang dengan persentase 4%.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya, rata-rata responden memiliki pendidikan SMA. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Penggunaan Lokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel V.3 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	2	2%
2	SMP	6	6%
3	SMA	50	52%
4	Diploma	19	20%
5	Sarjana S1/S2	20	20%
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Masyarakat adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan

Hilir dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 50 orang dengan persentase 52%, responden yang memiliki pendidikan Sarjana S1/S2 berjumlah 20 orang dengan persentase 20%, responden yang memiliki pendidikan Diploma berjumlah 19 orang dengan persentase 20%, sedangkan yang paling mini adalah responden yang memiliki pendidikan SD yaitu berjumlah 2 orang dengan persentase 2%.

#### **B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang di maksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong (2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir adalah berdasarkan teori dari Dunn (dalam Subarsono, 2013:126). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu

pembahas akan menganalisis tentang indikator Efektivitas maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang di dukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepadamasyarakat yang dijadikan sebagai sampel. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

### **1. Efektivitas**

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu,biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Jadi efektivitas merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan seseorang. Dapat dikatakan efektif jika pekerjaannya tepat pada waktu, biaya, serta kualitasnya.

Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Pengelolaan dana Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, Meningkatkan Kualitas apparatur Pemerintahan Kepenghuluan.

**Tabel V.4 : Distribusi frekuensi tanggapan responden masyarakat terkait indikator yang pertama yaitu “Efektivitas”**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Tidak Optimal	
1	Pengelolaan dana Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan	2 (2%)	62 (64%)	33 (34%)	97 (100%)
2	Meningkatkan Kualitas apparatur Pemerintahan Kepenghuluan	1 (1%)	77 (79%)	19 (20%)	97 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>139</b>	<b>52</b>	<b>194</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>97</b>
<b>Persentase</b>		<b>1%</b>	<b>72%</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.4 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Optimal” adalah rata-rata 1 orang dan persentasenya adalah 1%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Optimal” adalah rata-rata 70 orang dengan persentase 72%, dan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Optimal” yaitu berjumlah 26 orang dengan persentase 27% dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat yaitu 97 orang.

Guna melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis melengkapi hasil penelitian ini dengan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan perwakilan kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya untuk mempertegas apakah jawaban yang di dapatkan dari penyebaran kuesioner telah sesuai dengan



kenyataan yang terjadi dilapangan atau justru sebaliknya, adapun sumber responden yang penulis wawancarai adalah Penghulu Teluk Pulau Hulu, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh “Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau, yaitu Bapak Zulkifli dan tanggapan yang beliau berikan terkait indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan tentunya dimulai dengan target yang harus di capai, setelah target di tentukan, barulah di buat susunan anggaran yang akan di alokasikan terkait pembangunan tersebut, dan sejauh ini, pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya yang dilakukan di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu sudah sesuai dengan perencanaan yang di tetapkan tersebut, dan laporan-laporan yang dibutuhkan juga sudah diberikan kepada pihak Kabupaten yang sekaligus menjadi bukti kinerja kita di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu ini”. (Wawancara, Tanggal 25 Maret 2019, Bapak Zulkifli Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu)

Selain dari jawaban terkait dengan sub indikator yang pertama, penulis juga menanyakan perihal sub indikator yang kedua, dimana pertanyaan yang penulis ajukan berkaitan dengan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan di kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, dan adapun jawaban yang diberikan oleh perwakilan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu melalui Sekretaris Kepenghuluan, yaitu Bapak Zulkifli adalah sebagai berikut:

“Salah satu cara yang kita lakukan untuk peningkatan kualitas aparatur dari pemerintahan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu adalah program-program seminar dan kunjungan kerja ke Desa atau Kelurahan atau bahkan kepenghuluan yang kualitasnya kita anggap memang lebih baik dari kita sendiri, salah satunya bisa dilihat dari keberhasilan desa mereka memanfaatkan sumber daya alam di desa nya, meningkatkan PAD Desa nya, dan tata desa serta prestasi dari desa yang akan dijadikan referensi tempat untuk belajar”. (Wawancara, Tanggal 25 Maret 2019, Bapak Zulkifli Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kepenghuluan

Teluk Hulu memang sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dibuat dan dana yang dialokasikan juga telah sesuai dengan budgeting yang telah di susun.

Dari hasil pengamatan observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan bahwa pembangunan di beberapa sektor memang sudah dibangun dan dijalankan, tetapi sektor-sektor lain ada yang memang sama sekali tidak tersentuh akan proses pembangunan, seperti kawasan banjir di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu yang menjadi masalah warga dari tahun ke tahun, jalan-jalan yang tidak kunjung diperbaiki serta sektor lainnya.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Jadi efisiensi ini lebih ke penggunaan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. jika anggarannya mencukupi atau memadai maka, pelaksanaan suatu kebijakan seperti pengawasan mobik bertonase besar bisa dilaksanakan di lapangan, dan hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Efisiensi” yang

memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Distribusi frekuensi tanggapan responden masyarakat terkait indikator yang kedua yaitu “Efisiensi”**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Tidak Optimal	
1	Mengatur rencana kegiatan pembangunan Kepenghuluan	5 (5%)	77 (79%)	15 (15%)	97 (100%)
2	Melaksanakan pembangunan Kepenghuluan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditentukan	2 (2%)	46 (47%)	49 (51%)	97 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>123</b>	<b>64</b>	<b>194</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>3</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>97</b>
<b>Persentase</b>		<b>3%</b>	<b>64%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.5 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Optimal” adalah rata-rata 3 orang dan persentasenya adalah 3%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Optimal” adalah rata-rata 62 orang dengan persentase 64%, dan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Optimal” yaitu berjumlah 32 orang dengan persentase 33% dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat yaitu 97 orang.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis melengkapi hasil penelitian ini dengan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan perwakilan kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya untuk mempertegas apakah jawaban yang di dapatkan dari penyebaran kuesioner telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau justru sebaliknya, adapun sumber responden yang penulis wawancarai adalah Penghulu Teluk Pulau Hulu, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh “Sekretaris Perencanaan Kepenghuluan Teluk Pulau, yaitu Bapak Zulkifli dan tanggapan yang beliau berikan terkait indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Proses pembangunan yang dilakukan ini menggunakan system kontrak dengan pengembang, contohnya membangun drainase air di jalan, itu kan bukan kita yang melakukan pembangunan langsung, ada kontraktornya yang kita bayar, jadi dalam kontrak kerja kita ada kesepakatan mengenai estimasi waktu penyelesaian, jadi jika pembangunan yang tidak selesai dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka akan berlaku system pinalti atau denda, dan selama ini pembangunan yang sudah kita lakukan, hampir keseluruhan memang sesuai dengan waktu yang ditetapkan, hanya ada beberapa pembangunan saya yang memang sedikit lebih lama penyelesaiannya karna ada permasalahan terkait pendanaan dan biaya pembangunan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan”.  
(Wawancara, Tanggal 25 Maret 2019, Bpk Zulkifli Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pembangunan yang dilakukan di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang belum sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dan dengan fakta dilapangan yang terlihat, dimana proses pembangunan yang ada hanya dilakukan sedikit dan

penyelesaiannya sangat lama, dimana penyelesaian pembangunan yang dilakukan bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun lamanya, dan beberapa proses pembangunan memang terbengkalai dan tidak dilanjutkan sampai selesai, seperti pembangunan semenisasi jalan kampung.

### 3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Kecukupan” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.6 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat Terkait Indikator yang ketiga yaitu “Kecukupan”.**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran	Jumlah
----	---------------	-----------------	--------

		<b>Optimal</b>	<b>Cukup Optimal</b>	<b>Tidak Optimal</b>	
<b>1</b>	Pembangunan yang dilakukan sesuai dengan dana yang dianggarkan	10 (10%)	67 (69%)	20 (21%)	97 (100%)
<b>2</b>	Pembangunan Kepenghuluan yang dilaksanakan sesuai dengan masyarakat Kepenghuluan butuhkan	7 (7%)	42 (43%)	48 (49%)	97 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>109</b>	<b>68</b>	<b>194</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>8</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>97</b>
<b>Persentase</b>		<b>8%</b>	<b>57%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.6 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Optimal” adalah rata-rata 8 orang dan persentasenya adalah 8%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Optimal” adalah rata-rata 55 orang dengan persentase 57%, dan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Optimal” yaitu berjumlah 34 orang dengan persentase 35% dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat yaitu 97 orang.

Melengkapi hasil penelitian yang penulis dapatkan diatas, penulis melengkapi hasil penelitian ini dengan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan perwakilan kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya untuk mempertegas

apakah jawaban yang di dapatkan dari penyebaran kuesioner telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau justru sebaliknya, adapun sumber responden yang penulis wawancarai adalah Penghulu Teluk Pulau Hulu, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh “Sekretaris Perencanaan Kepenghuluan Teluk Pulau, yaitu Bapak Zulkifli dan tanggapan yang beliau berikan terkait indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya, tidak semua perencanaan itu bisa benar-benar sesuai dengan fakta dilapangan, dan untuk mencegah hal tersebut, maka dibuatkan penganggaran dan system kontrak kerja, hal ini baik untuk pemerintah, karna kekurangan ataupun kelebihan dari proses pembangunan sudah menjadi tanggung jawab dari kontrak kerja si kontraktornya, dan pastinya pemerintah tidak akan mengalami kerugian jika sewaktu-waktu ada kekurangan dari pembiayaan pembangunan, tetapi jika kelebihan, kita selalu mencari harga terendah dalam memilih kontraktornya, jadi harga terendah tersebut untuk mengurasi resiko kerugian yang akan terjadi dan merugikan keuangan dari Kepenghuluan”. (Wawancara, Tanggal 25 Maret 2019, Bapak Zulkifli Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu)

Selain dari hasil wawancara yang berkaitan dengan proses waktu pembangunan infrastruktur, penulis juga memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan, apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat atau justru sebaliknya, dan adapun jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut:

“Kita melakukan pembangunan berdasarkan hal yang paling dasar, yaitu prioritas, dimana pembangunan yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah prioritas yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah kepenghuluan dalam melayani masarakat, setelah itu barulah prioritas yang mendasar dilapangan, seperti jalan, jembatan, drainase, dan kebutuhan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. (Wawancara,

Tanggal 25 Maret 2019, Bapak Zulkifli Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pembangunan yang dilakukan di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang memang belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, hal ini mungkin memiliki kaitan dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Zulkifli diatas, dimana prioritas yang ditentukan oleh pemerintah Kepenghuluan mungkin tidak sampai kepada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilapangan.

#### **4. Pemerataan**

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran, pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan, suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Jadi pemerataan berpatokan pada keadilan dan kewajaran.



Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

**Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang Ke Empat Yaitu “Pemerataan”**

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Tidak Optimal	
1	Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan dilakukan dengan secara merata dan adil	15 (15%)	39 (40%)	43 (44%)	97 (100%)
2	Pengelolaan dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan	12 (12%)	65 (67%)	20 (21%)	97 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>104</b>	<b>63</b>	<b>194</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>13</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>97</b>
<b>Persentase</b>		<b>13%</b>	<b>54%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Optimal” adalah rata-rata 13 orang dan persentasenya adalah 13%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Optimal” adalah rata-rata 52 orang dengan persentase 54%, dan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak

Optimal” yaitu berjumlah 32 orang dengan persentase 33% dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat yaitu 97 orang.

Melengkapi hasil penelitian yang penulis dapatkan diatas, penulis melengkapi hasil penelitian ini dengan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan perwakilan kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya untuk mempertegas apakah jawaban yang di dapatkan dari penyebaran kuesioner telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau justru sebaliknya, adapun sumber responden yang penulis wawancarai adalah Penghulu Teluk Pulau Hulu, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh “Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau, yaitu Bapak Zulkifli dan tanggapan yang beliau berikan terkait indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan pastinya mengedepankan keadilan dan tentunya kejujuran dalam proses pendanaannya, kita masih tahap pembangunan, jadi jika memang masih ada sektor yang belum selesai di tangani, harap bersabar, karna semua serba terbatas juga kan, pedanaan, sumber daya manusianya, dan juga lain-lainnya serba terbatas semua”. (Wawancara, Tanggal 25 Maret 2019, Bapak Zulkifli Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu)

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil. Masih banyak pembangunan seperti jalan yang seharusnya diperbaiki tetapi belum dilaksanakannya perbaikan seperti semenisasi jalan.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator yang ke 5 (lima), dimana pembahasannya tentang responsivitas, dan untuk lebih lengkapnya, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

## 5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat.

Responsivitas menurut Agus Dwiyanto (226:148) adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna. Responsivitas yang diperlukan dalam hal ini adalah Kepenghuluan Teluk Pualu Hulu terhadap laporan dari masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

**Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Yang Kelima Yaitu “Responsivitas”.**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Tidak Optimal	
1	Aparatur Pemerintahan Kepenghuluan selalu	9 (9%)	51 (53%)	37 (38%)	97 (100%)

	respon dengan baik terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat				
2	Cepat tanggap dalam melakukan inovasi pengembangan pembangunan Kepenghuluan	8 (8%)	54 (56%)	35 (36%)	97 (100%)
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>72</b>	<b>194</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>97</b>
	<b>Persentase</b>	<b>9%</b>	<b>54%</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.8 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Optimal” adalah rata-rata 9 orang dan persentasenya adalah 9%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Optimal” adalah rata-rata 52 orang dengan persentase 54%, dan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Optimal” yaitu berjumlah 36 orang dengan persentase 37% dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat yaitu 97 orang.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis melengkapi hasil penelitian ini dengan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan perwakilan kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya untuk mempertegas apakah jawaban yang di dapatkan dari penyebaran kuesioner telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau justru sebaliknya, adapun sumber responden yang penulis wawancarai adalah Penghulu Teluk Pulau Hulu, yang mana dalam hal

ini diwakilkan oleh “Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau, yaitu Bapak Zulkifli dan tanggapan yang beliau berikan terkait indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Pastinya kita tanggap terhadap isu-isu yang ada dimasyarakat, karna kita juga bagian dari masarakat itu sendiri, saya pribadi sering mendapatkan masukan atau saran-saran di lingkungan saya, dan itu saya teruskan apabila ada rapat-rapat yang membahas tentang program apa yang harus dilaksanakan pada tahun depan atau anggaran di tahun berikutnya”. (Wawancara, Tanggal 25 Maret 2019, Bapak Zulkifli Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat mengakui memang benar jika sering kali masyarakat menyampaikan keluhannya kepada para pemangku kepentingan di kantor Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, hal yang disampaikan memang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan-bantuan, pendanaan, atau pinjaman pendanaan yang dapat diberikan kepada masyarakat, dan hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh bapak Zulifli yang menjabat sebagai Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif untuk dijadikan rekomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif karena ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut, ketepatan yang harus diperhatikan dalam penertiban ini adalah waktu pelaksanaanya, tujuan dari pelaksanaan, serta dampak dari

pelaksanaan yang akan di capai. Jika ketiga hal tersebut sudah tepat maka dapat dikatakan program pembangunan fisik dari kinerja terlaksana dengan baik.

**Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Pembahasan Indikator Ke Enam Yaitu “Ketepatan”**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Tidak Optimal	
1	Merealisasikan pembangunan fisik sesuai dengan alokasi dana kepenghuluan.	26 (27%)	40 (41%)	31 (32%)	97 (100%)
2	Merealisasikan pembangunan fisik sesuai dengan perencanaan pembangunan	11 (11%)	59 (61%)	27 (28%)	97 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>99</b>	<b>58</b>	<b>194</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>19</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>97</b>
<b>Persentase</b>		<b>19%</b>	<b>96%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Optimal” adalah rata-rata 19 orang dan persentasenya adalah 10%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Optimal” adalah rata-rata 49 orang dengan persentase 51%, dan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Optimal” yaitu berjumlah 29 orang dengan persentase 30% dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat yaitu 97 orang.

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis melengkapi hasil penelitian ini dengan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan perwakilan kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang,

Kabupaten Rokan Hilir, dimana hasil wawancara ini tentunya untuk mempertegas apakah jawaban yang di dapatkan dari penyebaran kuesioner telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau justru sebaliknya, adapun sumber responden yang penulis wawancarai adalah Penghulu Teluk Pulau Hulu, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh “Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau, yaitu Bapak Zulkifli dan tanggapan yang beliau berikan terkait indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Pembangunan yang kita lakukan saat ini ataupun beberapa tahun terakhir ini tentunya sudah sesuai dengan perencanaan yang di susun, dimana perencanaan tersebut berkaitan dengan pendanaan, kontrak kerja, estimasi pembangunan dan perencanaan-perencanaan lainnya”. (Wawancara, Tanggal 25 Maret 2019, Bapak Zulkifli Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan, masih ada beberapa pembangunan yang belum terlaksana tetapi memang sudah ada di dalam program kerja dari Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu.

### **C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Efektivitas” kemudian indikator yang kedua adalah “Efisiensi”, indikator ke tiga “Kecukupan” dan indikator ke empat adalah “Pemerataan”, dan indikator yang ke lima adalah “Responsivitas”, serta indikator yang ke enam adalah “Ketepatan” dan di dukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan

baik yang mana dalam melakukan observasi penulis melakukannya di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang ditentukan oleh penulis.

Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuesioner dari ke-enam indikator maka, dapat dibuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel pada indikator, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden, jadi ke 6 (enam) indikator ini di jabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarakan pada masyarakat.

**Tabel V.10 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Penelitian Di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Tidak Optimal	
1	Efektivitas	1 (1%)	70 (72%)	26 (27%)	97 (100%)
2	Efisiensi	3 (3%)	62 (64%)	32 (33%)	97 (100%)
3	Kecukupan	8 (8%)	55 (57%)	34 (35%)	97 (100%)
4	Pemerataan	13 (13%)	52 (54%)	32 (33%)	97 (100%)



5	Responsivitas	9 (9%)	52 (54%)	36 (37%)	97 (100%)
6	Ketepatan	19 (19%)	49 (51%)	29 (30%)	97 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>340</b>	<b>189</b>	<b>582</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>97</b>
<b>Persentase</b>		<b>9%</b>	<b>59%</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.10 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung terhadap Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang, dengan menggunakan teori sebagai tolak ukur, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan, maka di peroleh rata-rata responden memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Optimal” yaitu 57 orang responden dengan persentase 59% dan pada kategori “TidakOptimal” responden yang memberikan tanggapan rata-rata 3 orang responden dengan persentase 32% dan yang terakhir pada kategori “Optimal” rata-rata responden memberikan tanggapan 9 orang responden dengan persentase 9%.

#### **D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Aparatur Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**

Dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas, tentunya akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang timbul di dalamnya, dimana permasalahan ini dapat menjadi faktor penghambat yang mengakibatkan terkendalannya proses kebijakan tersebut terealisasi, salah satunya adalah terkait

dengan pembangunan yang terjadi di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, dan adapun faktor penghambat yang dialami dalam proses pembangunan selama ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu adalah kekurangan Sumber Daya, hal ini mencakup beberapa hal seperti sumber daya anggaran, sumber daya manusia, yang memang belum mencukupi untuk melakukan pembangunan sekaligus guna pemerataan pembangunan.
2. Faktor penghambat lainnya adalah proses pembangunan yang dilaksanakan terkadang mengalami kendala disaat proses pembangunannya, baik itu masalah yang diakibatkan oleh faktor cuaca, ataupun kendala yang timbul dari pihak external seperti pelaksana pembangunan yang sudah memegang kontrak kerja dengan pihak Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu.
3. Yang terakhir adalah minimnya pendapatan asli desa yang tidak bisa mendongkrak proses pembangunan, sehingga harus menunggu anggaran yang disediakan oleh pusat terlebih dahulu.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Maka penulis mendapatkan kesimpulan Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir adalah jawaban yang masuk ke dalam kategori “Cukup Optimal”.
2. Faktor penghambat yang dialami dalam proses pembangunan selama ini adalah (1) Faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu adalah kekurangan Sumber Daya, hal ini mencakup beberapa hal seperti sumber daya anggaran, sumber daya manusia, yang memang belum mencukupi untuk melakukan pembangunan sekaligus guna pemerataan pembangunan, (2) faktor penghambat lainnya adalah proses pembangunan yang dilaksanakan terkadang mengalami kendala disaat proses pembangunannya, baik itu masalah yang diakibatkan oleh faktor cuaca, ataupun kendala yang timbul dari pihak external seperti pelaksana pembangunan yang sudah memegang kontrak kerja dengan pihak Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, (3) dan yang terakhir adalah minimnya pendapatan asli desa yang tidak

bisa mendongkrak proses pembangunan, sehingga harus menunggu anggaran yang disediakan oleh pusat terlebih dahulu

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan kepada pihak Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu agar meningkatkan jumlah anggaran yang akan di programkan pada tahun berikutnya dan difokuskan kepada proses pembangunan fisik infrastruktur yang akan dilaksanakan di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang.
2. Penulis menyarankan kepada pihak Kepenghuluan agar lebih selektif dalam menentukan kontraktor atau pemborong dalam melaksanakan pembangunan yang di programkan di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan kualitas pembangunannya.
3. Penulis menyarankan agar Pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu meningkatkan pendapatannya dari sektor-sektor yang potensial di kepenghuluan itu sendiri, hal ini bisa saja seperti pendapatan dari Retribusi Pasar, ataupun potensi-potensi lain yang memiliki kemungkinan sebagai pemasukan bagi Kepenghuluan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik, cet.ke-2*, Bandung : alfabeta
- Agus Dwiyanto, 2006. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Asshiddiqie. Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Afifuddin. 2013. *Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryanto, Imam, 2007. *Membuat Database Dengan MS Office Access*, Bandung: Informatika.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo usaha.
- Muhammad Yamin. 2012. *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahfud. 2012. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta.

- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, Eko. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV ALFABETA
- Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana 82 a Media Group
- Syafiie, Inu Kencana dkk, 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Siddiq. 2003. *Proses Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Widjaja, HAW. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zulkifli, 2009. *fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru. UIR Press.

**B. Dokumentasi Penelitian:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan  
Kepenghuluan

Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau